

The Influence of Internal Control Systems on The Accountability of APBDes Management in Lemahsugih District Majalengka Regency

Erpi Rahman¹ Sulistiani², Ryan Feryana Kurniawan³

¹²³Universitas Sebelas April

erpi.feb@unsap.ac.id, sulistiani.feb@unsap.ac.id, ryan.feb@unsap.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jan 12, 2025

Revised Feb 20, 2025

Accepted March 17, 2025

Keywords:

Internal Control
Systems, Accountability,
APBDes Management

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of internal control systems on the accountability of APBDes management in Lemahsugih district Majalengka Regency. This study uses a quantitative approach as a research method. This study uses primary data obtained through questionnaires. The sampling method applied in this study is purposive sampling. The number of samples used in this study is 75 respondents. Data analysis was conducted using various methods, including descriptive statistical analysis, normality test, linearity test, heteroscedasticity test, simple linear regression analysis, t-test, as well as testing for correlation coefficient, and determination coefficient. The results of this study obtained a regression coefficient value of 0.621 or 62.1%. The calculated t-value of 6.638 is greater than the table t-value of 1.993, and the significance value of 0.000 is less than 0.05. Therefore, it can be concluded that there is an effect of the internal control system on the accountability of APBDes management in Lemahsugih District Majalengka Regency. The magnitude of this effect is reflected in determination coefficient value of 0.376 or 37.6%. This means that the internal control system has an influence on the accountability of APBDes management in Lemahsugih District, Majalengka Regency by 37.6%. The remaining 62.4% is influenced by other variables not examined in this study. Thus, a strong internal control system helps to improve the accountability of APBDes management..



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Erpi Rahman,
Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl. Angkrek Situ Nomor 19, Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45323 telp (0261) 202911.
Email: erpi.feb@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memperkenalkan peraturan baru terkait konsep tata kelola desa di Indonesia (Hasanah et al., 2020). Undang-Undang Tentang Desa memberikan kebijakan mengenai pendapatan desa sehingga desa menerima berbagai bantuan baik yang berasal dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah seperti bantuan dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memperoleh bantuan dana desa yang cukup signifikan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2023 mencatat bahwa pagu anggaran dana desa Kabupaten Majalengka pada tahun 2021 hingga tahun 2023 mencapai Rp 300 miliar setiap tahunnya. Besarnya anggaran dana desa tersebut dialokasikan kepada 26 Kecamatan di Kabupaten Majalengka.

Kecamatan Lemahsugih merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Majalengka yang menerima bantuan dana desa. Adapun pagu anggaran dana desa Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yaitu:

Tabel 1 Pagu Anggaran Dana Desa Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023

No	Desa	Tah u n		
		2021	2022	2023
1	Cipasung	1.338.333.000	1.148.734.000	1.015.044.000
2	Bangbayang	1.371.914.000	1.157.833.000	1.087.099.000
3	Borogojol	1.440.109.000	1.390.573.000	1.090.006.000
4	Cibulan	1.181.843.000	910.227.000	1.052.442.000
5	Lemahputih	1.387.077.000	1.565.926.000	1.025.457.000
6	Sadawangi	1.253.509.000	1.388.410.000	1.124.616.000
7	Kepuh	1.304.212.000	1.512.976.000	1.091.079.000
8	Padarek	1.400.428.000	1.525.457.000	1.373.720.000
9	Kalapadua	1.233.146.000	1.644.760.000	1.120.289.000
10	Cigaleuh	1.495.532.000	1.576.078.000	1.281.283.000
11	Margajaya	1.542.363.000	1.394.755.000	1.060.914.000
12	Sukajadi	1.137.859.000	1.109.933.000	1.037.594.000
13	Mekarwangi	1.634.632.000	1.540.016.000	1.137.415.000
14	Sinargalih	1.803.765.000	1.921.980.000	1.521.303.000
15	Mekarmulya	1.193.408.000	1.286.235.000	1.190.943.000
16	Sukamaju	1.121.273.000	1.081.166.000	984.103.000
17	Cisalak	960.322.000	844.113.000	1.008.905.00
18	Dayeuhwangi	1.132.295.000	1.192.507.000	962.917.000
19	Lemahsugih	1.280.073.000	1.114.341.000	860.103.000

Sumber:diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 1, besarnya anggaran dana desa Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 rata-rata mencapai 1 miliar setiap tahunnya. Besarnya anggaran yang diterima menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan (Haning et al., 2020:54). Akuntabilitas pengelolaan APBDes dilaksanakan dengan menyediakan berbagai informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban sehingga dapat dijadikan bahan kajian pengelolaan APBDes di tahun yang akan datang. Komponen dalam akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas etika, akuntabilitas hukum, akuntabilitas demokrasi, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas politik (Haning et al., 2020:57).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBDes di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, terdapat beberapa indikator akuntabilitas yang belum terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa sosialisasi mengenai kode etik aparat pemerintah desa belum pernah dilaksanakan. Selain itu, evaluasi internal secara rutin dalam pengelolaan APBDes belum dilaksanakan secara merata oleh pemerintah desa di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas etika sehingga terciptanya komitmen terhadap norma dan etika dalam pengelolaan APBDes.

Permasalahan kedua yaitu adanya pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berlaku melalui tindakan penyalahgunaan anggaran pada salah satu desa di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Berdasarkan keterangan Hasbih selaku Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka, AR diduga menyalahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 untuk kepentingan pribadinya. Dari total ADD yang diterima, hanya Rp 22.000.000 anggaran yang digunakan untuk kepentingan desa sehingga sisanya sebesar Rp 114.000.000 dipergunakan tersangka untuk kebutuhan konsumtif (Pikiran-rakyat.com, 2017). Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa anggaran desa dialokasikan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat penyalahgunaan anggaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, permasalahan ketiga yaitu terdapat salah satu pemerintah desa yang tidak menyediakan informasi tentang pemanfaatan alokasi anggaran tahun 2023. Hasil observasi yang telah dilakukan di 19 desa di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa terdapat satu desa yang tidak menyediakan banner info grafik APBDes Tahun 2023. Banner yang memuat informasi APBDes seharusnya dicetak dan dipajang pada awal tahun 2023. Namun, hingga akhir tahun 2023 banner yang memuat informasi APBDes tersebut tidak ditemukan. Sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan APBDes, pemerintah desa di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka menggunakan banner sebagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan.

Permasalahan-permasalahan diatas menunjukkan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBDes yang kurang berjalan dengan baik. Akuntabilitas pengelolaan APBDes yang kurang berjalan dengan baik membutuhkan adanya upaya yang harus dilakukan untuk membantu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBDes.

Salah satu upaya untuk membantu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBDes adalah dengan pelaksanaan sistem pengendalian internal. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pengendalian internal wajib diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Pendapat ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Sholikhah et al., (2022), Hasanah et al., (2020), dan Jayanti & Setiyani (2022) yang memperoleh bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Husain et al., (2023) dan Nislandi & Munari (2023) memperoleh hasil penelitian yang sama bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian internal merupakan prosedur dan kebijakan yang diterapkan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Hery, 2019:132). Komponen-komponen dalam sistem pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi akuntansi, serta pemantauan (Hery, 2019:134).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, ditemukan bahwa kegiatan pelatihan untuk membantu meningkatkan kompetensi aparatur desa masih jarang diselenggarakan. Standar kompetensi yang tidak ditetapkan dengan jelas juga menyebabkan adanya kesulitan karena kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, kebijakan yang berkaitan dengan masalah integritas, etika, dan kompetensi belum optimal.

Permasalahan lain dalam sistem pengendalian internal yaitu adanya kasus yang mengindikasikan pemisahan tugas yang belum memadai dan kurangnya pengendalian fisik atas aset dan catatan. Menurut Wakapolresta Majalengka Kopol Hidayatullah, tersangka BD memanfaatkan bantuan dana desa dan bantuan infrastruktur perdesaan tahun 2016 melalui modus proposal fiktif karena diduga tidak menyalurkan bantuan yang sesuai dengan proposal sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 195.748.603 (Jabar.idntimes.com, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kelemahan dalam dua indikator sistem pengendalian internal yaitu pemisahan tugas yang belum memadai dan kurangnya pengendalian fisik atas aset dan catatan sehingga memberikan peluang tindak pidana korupsi dana desa dengan menggunakan modus proposal fiktif. Dalam kasus ini, satu individu berperan dalam proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan proposal. Seharusnya, proses ini melibatkan beberapa pihak untuk menghindari adanya risiko kecurangan.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal yang lemah menyebabkan akuntabilitas pengelolaan APBDes yang tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDes di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

2. STUDY LITERATURE

Teori Perilaku Terencana (*Theory of planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) merupakan evolusi dari Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*) yang diperkenalkan oleh Ajzen & Fisbein pada tahun 1980. Teori perilaku terencana menekankan bahwa niat adalah faktor utama seseorang dalam melaksanakan perilaku tertentu. Niat dapat diartikan sebagai dorongan atau motivasi yang memengaruhi perilaku individu. Semakin kuat niat seseorang, maka semakin tinggi juga kemungkinan perilaku tersebut akan terjadi.

Dalam teori perilaku terencana, terdapat tambahan faktor yang menentukan keinginan seseorang untuk melakukan suatu tindakan yaitu kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavior control*). *Perceived behavior control* merujuk pada persepsi seseorang tentang tingkat kesulitan atau kemudahan dalam melakukan suatu perilaku. Kesulitan dan kemudahan melakukan perilaku tersebut merupakan cerminan dari pengalaman dan antisipasi dalam menghadapi hambatan. Sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan merupakan tiga faktor yang dapat memprediksi keinginan atau niat seseorang dalam melakukan suatu perilaku.

Auditing

Auditing adalah proses yang dilaksanakan secara terstruktur untuk mengumpulkan dan menilai bukti yang terkait dengan keyakinan atas tindakan yang berhubungan dengan peristiwa ekonomi untuk mengetahui seberapa tepat informasi yang telah dikumpulkan dalam memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yang kemudian hasil pemeriksaan disampaikan kepada para pemangku kepentingan (Hery, 2019:10). Selain itu, *auditing* diartikan sebagai proses pengumpulan dan evaluasi bukti yang berkaitan dengan informasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan melaporkan apakah informasi tersebut telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Sari et al., 2020:4).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan (Haning et al., 2020:54). Akuntabilitas dapat diciptakan dengan adanya usaha untuk membuat pemerintah bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang telah dilakukan, menetapkan standar yang digunakan untuk mengukur kinerja aparat pemerintahan, dan menetapkan sistem untuk memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan telah dilaksanakan (Yusri & Chairina, 2023:30). Untuk menjaga kepercayaan publik, dimensi dan indikator akuntabilitas yang harus dipenuhi menurut Haning et al., (2020:57) meliputi akuntabilitas etika, akuntabilitas hukum, akuntabilitas demokrasi, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas politik.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun dan disepakati oleh pemerintah desa dan BPD untuk kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Desa (Rohman et al., 2018:184). APBDes berfungsi sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa untuk satu tahun anggaran yang berlangsung pada 1 Januari hingga 31 Desember (Raharjo, 2020:50). APBDes meliputi sumber pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan APBDes mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Raharjo, 2020:12).

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan prosedur dan kebijakan yang diterapkan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Hery, 2019:132). Pengendalian internal dalam pemerintahan didasarkan pada PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Peraturan ini mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh semua elemen pemerintahan untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien, keamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen-komponen dalam sistem pengendalian internal mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Hery, 2019:134).

3. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pemerintah desa di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang terdiri dari 19 Desa. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *sampling purposive* melalui pertimbangan dan kriteria berdasarkan tugas dan fungsi dalam pengelolaan APBDes sehingga sampel dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Badan Permusyawaratan Masyarakat (BPD). Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka total sampel harapan dalam penelitian ini adalah sebanyak 76 sampel.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji linearitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear sederhana, uji t, pengujian koefisien korelasi, dan koefisien determinasi.

4. RESULTS AND DISCUSSION

a. Results

Hasil penelitian ini didapatkan dari lembar kuesioner penelitian yang telah didistribusikan di 19 Desa di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Penyebaran hingga pengumpulan kuesioner penelitian dilaksanakan pada Selasa, 11 Juni 2024 sampai dengan Kamis, 11 Juli 2024. Total kuesioner yang telah disebar yaitu sebanyak 76 kuesioner. Jumlah kuesioner yang dapat diolah yaitu sebanyak 75 kuesioner atau sebesar 98.68%. Dalam penelitian ini, terdapat satu kuesioner atau 1.32% yang tidak kembali. Hal ini dikarenakan Kepala Desa di salah satu desa telah meninggal dunia pada Rabu, 22 Mei 2024. Karena kondisi ini, jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 75 kuesioner.

Uji Validitas

Uji Validitas dalam penelitian ini menggunakan metode korelasi *product moment* dengan bantuan SPSS v.21. Berikut adalah hasil perhitungan validitas variabel sistem pengendalian internal (X) dan akuntabilitas pengelolaan APBDes (Y):

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal (X) dan Akuntabilitas Pengelolaan

AP BDes (Y) Item Pertanyaan 1 s. d 15				
Variabel	Item	0,000	0,000	Keterangan
gan				
Sistem Pengendalian Internal (X)	Item-1	0,607	0,227	Valid
	Item-2	0,489	0,227	Valid
	Item-3	0,639	0,227	Valid
	Item-4	0,500	0,227	Valid
	Item-5	0,584	0,227	Valid
	Item-6	0,567	0,227	Valid
	Item-7	0,561	0,227	Valid
	Item-8	0,553	0,227	Valid
	Item-9	0,478	0,227	Valid
	Item-10	0,573	0,227	Valid
	Item-11	0,620	0,227	Valid
	Item-12	0,573	0,227	Valid
	Item-13	0,520	0,227	Valid
	Item-14	0,548	0,227	Valid
	Item-15	0,637	0,227	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan APBDes (Y)	Item-1	0,303	0,227	Valid
	Item-2	0,681	0,227	Valid
	Item-3	0,588	0,227	Valid
	Item-4	0,615	0,227	Valid
	Item-5	0,727	0,227	Valid
	Item-6	0,378	0,227	Valid
	Item-7	0,489	0,227	Valid
	Item-8	0,371	0,227	Valid
	Item-9	0,760	0,227	Valid
	Item-10	0,697	0,227	Valid
	Item-11	0,427	0,227	Valid
	Item-12	0,683	0,227	Valid
	Item-13	0,341	0,227	Valid
	Item-14	0,400	0,227	Valid

Sumber:diolah oleh peneliti dengan SPSS 21, 2024

Item-15	0,547	0,227	Valid
---------	-------	-------	-------

Sumber:diolah oleh peneliti dengan SPSS 21, 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil perhitungan uji validitas variabel Sistem Pengendalian Internal (X) memperoleh nilai hitung paling kecil 0,478 > tabel 0,227. Selain itu, variabel Akuntabilitas Pengelolaan APBDes (Y) memperoleh nilai hitung paling kecil 0,303 > tabel 0,227. Maka dari itu, butir-butir pertanyaan dapat dinyatakan sah dan valid untuk digunakan dalam penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas koefisien *Cronbach's Alpha* dengan bantuan SPSS v.21. Instrumen dapat dianggap reliabel jika nilai Alpha > 0,60. Berikut adalah hasil uji reliabilitas variabel penelitian:

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Internal (X) dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes (Y)

Variabel	Reliabilitas Statistic	
	Cronbach's Alpha	N of Items
Sistem Pengendalian Internal (X)	.846	15
Akuntabilitas Pengelolaan APBDes (Y)	.825	15

Sumber:diolah oleh peneliti dengan SPSS 21, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* Sistem Pengendalian Internal (X) yaitu sebesar 0,846 dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes (Y) yaitu sebesar 0,825. Karena setiap variabel menunjukkan nilai Alpha > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk variabel dalam penelitian ini adalah reliabel atau konsisten.

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Pengendalian Internal	75	53.00	75.00	67.7333	4.27859
Akuntabilitas Pengelolaan APBDes	75	56.00	75.00	67.3467	4.32933
Valid N (listwise)	75				

Sumber:diolah oleh peneliti dengan SPSS 21, 2024

Tabel 4 menunjukkan gambaran distribusi data untuk masing-masing variabel yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X) memperoleh nilai minimum 53.00 dan nilai maximum 75.00. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 67.7333 dengan standar deviasi sebesar 4.27859.
2. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan APBDes (Y) memperoleh nilai minimum 56.00 dan nilai maximum 75.00. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 67.3467 dengan standar deviasi sebesar 4.32933.

Uji Normalitas

Penelitian ini menerapkan metode Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas dengan bantuan SPSS v.21. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		75
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	3.41887132
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.084
	Negative	-.126
Kolmogorov-Smirnov Z		1.091

Sumber:diolah oleh peneliti dengan SPSS 21, 2024

Asymp. Sig. (2-tailed)	.185
------------------------	------

Pada tabel 5, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) tercatat $0,185 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan kata lain, asumsi normalitas yang diperlukan untuk model regresi sudah terpenuhi.

Uji Linearitas

Penelitian ini, menggunakan *Test for Linearity* dengan bantuan SPSS v.21 untuk menguji linearitas. Hasil uji linearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Linearitas							
ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Akuntabilitas	Between	(Combined)	741.308	15	49.421	4.516	.000
Pengelolaan		Linearity	522.024	1	522.024	47.701	.000
APBDes *	Groups	Deviation	219.284	14	15.663	1.431	.168
Sistem		from Linearity					
Pengendalian	Within Groups		645.678	59	10.944		
Internal	Total		1386.987	74			

Sumber:diolah oleh peneliti dengan SPSS 21, 2024

Hasil uji linearitas menunjukkan bahwa nilai *Sig. Deviation from Linearity* adalah $0,168 > 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya hubungan linear yang signifikan antara variabel Sistem Pengendalian Internal (X) dengan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes (Y).

Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan uji Glejser dengan bantuan SPSS v.21 untuk menguji heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas					
Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.888	4.084		2.176	.033
1 Sistem	-.093	.060	-.179	-1.550	.125
Pengendalian Internal					

Sumber:diolah oleh peneliti dengan SPSS 21, 2024

Tabel 7 menunjukan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal (X) menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,125 > 0,05$. Dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Penelitian ini menerapkan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS v.21. Berikut adalah hasil dari analisis regresi linear sederhana:

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana					
Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	25.300	6.347		3.986	.000
1 Sistem	.621	.094	.613	6.638	.000
Pengendalian Internal					

Sumber:diolah oleh peneliti dengan SPSS 21, 2024

Tabel 8 menunjukan bahwa persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 25.300 + 0.621X$$

Analisis berdasarkan persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta 25.300 menunjukan nilai Akuntabilitas Pengelolaan APBDes (Y) ketika Sistem Pengendalian Internal (X) bernilai 0. Dalam hal ini, apabila tidak terdapat penerapan Sistem Pengendalian Internal (X) maka Akuntabilitas Pengelolaan APBDes (Y) memiliki nilai sebesar 25.300.
2. Nilai koefisien regresi memperoleh sebesar 0,621. Artinya, setiap peningkatan 1% sistem pengendalian internal diprediksi akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka sebesar 0.621 atau 62,1%.

Uji t (Uji Parsial)

Uji t (uji parsial) dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis H_0 dan H_a . Berikut hasil uji parsial yang telah diperoleh dengan bantuan SPSS v.21:

Tabel 9 Hasil Uji t (Uji Parsial)					
Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	25.300	6.347		3.986	.000
1 Sistem Pengendalian Internal	.621	.094	.613	6.638	.000

Sumber:diolah oleh peneliti dengan SPSS 21, 2024

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

$H_0 : \rho = 0$ Tidak terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDes di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

$H_a : \rho \neq 0$ Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDes di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa $t_{hitung} 6.638 > t_{tabel} 1.993$ dan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDes di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

Uji Koefisien Korelasi

Korelasi *product moment* dilakukan dengan bantuan SPSS v.21. Berikut hasil uji koefisien korelasi:

Tabel 10 Hasil Analisis Koefisien Korelasi			
Correlations			
		Sistem Pengendalian Internal	Akuntabilitas Pengelolaan APBDes **
Sistem Pengendalian Internal	Pearson Correlation	1	.613
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	75	75
Akuntabilitas Pengelolaan APBDes	Pearson Correlation	.613**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	75	75

Sumber:diolah oleh peneliti dengan SPSS 21, 2024

Berdasarkan tabel 10 diatas, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Hubungan antara Sistem Pengendalian Internal (X) dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes (Y) memperoleh nilai koefisien sebesar 0.613 > 0.227. Dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara variabel sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan APBDes. Karena t_{hitung} dalam penelitian ini bernilai positif, maka semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian internal maka semakin baik juga akuntabilitas pengelolaan APBDes di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.
2. Berdasarkan pedoman interpretasi menurut Sugiyono (2021:231), dikarenakan nilai yang diperoleh terdapat pada interval koefisien 0,60 – 0,799 maka tingkat hubungan antara Sistem Pengendalian Internal (X) dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes (Y) berada dalam kategori kuat.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yang diperoleh dengan bantuan SPSS v.21 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.613 ^a	.376	.368	3.442
a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal				

Sumber: diolah oleh peneliti dengan SPSS 21, 2024

Tabel 11 memperoleh nilai koefisien determinasi yaitu 0,376 sama dengan 37,6%. Artinya, sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDes sebesar 37,6%. Adapun sisanya yaitu 62,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti penggunaan teknologi informasi, budaya organisasi, dan kompetensi aparatur desa.

b. Discussion

Sistem pengendalian internal memperoleh nilai $t_{hitung} 6,638 > t_{tabel} 1,993$ dan nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Oleh dari itu, H_a diterima dan H_o ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Hasil uji koefisien korelasi memperoleh nilai r_{hitung} sebesar $0,613 > r_{tabel} 0,227$ dan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara variabel sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan APBDes. Tingkat hubungan tersebut berada pada kategori kuat karena berada pada interval $0,60 - 0,799$. Hasil uji koefisien determinasi memperoleh nilai R Square yaitu 0,376. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDes sebesar 0,376 atau setara dengan 37,6%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal, kurangnya standar kompetensi dan kegiatan pelatihan dalam pengelolaan APBDes, dan kebijakan sumber daya manusia yang berbeda dalam setiap pemerintah desa sehingga menyebabkan adanya variasi dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal. Adapun sisanya sebesar 62,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan budaya organisasi.

Sistem pengendalian internal yang kuat berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBDes. Sistem pengendalian internal dengan menerapkan lingkungan pengendalian yang baik diwujudkan melalui berbagai kegiatan pengendalian seperti adanya komitmen terhadap kompetensi yang baik, dan pelaksanaan kebijakan sumber daya yang tepat untuk memastikan bahwa setiap individu memahami peran dan tanggungjawab dalam pengelolaan APBDes, memiliki keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas dan pekerjaannya, serta memastikan bahwa kebijakan mengenai sumber daya dapat disusun dengan tepat sehingga terciptanya akuntabilitas pengelolaan APBDes yang efektif dan efisien.

Di samping itu, penerapan sistem pengendalian internal melalui penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi akuntansi, serta pemantauan yang baik membantu meminimalisir adanya risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan dalam pengelolaan APBDes, mencegah kecurangan dan kesalahan dalam pencatatan, menjamin pelaksanaan sistem pengendalian internal berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBDes. Oleh dari itu, sistem pengendalian internal berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBDes.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah et al., (2020), Sholikhah et al., (2022) dan Jayanti & Setiyani (2022) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

5. CONCLUSION

Sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDes di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,621 atau 62,1%, nilai signifikansi 0,000 dan koefisien determinasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,376 atau 37,6%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDes di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka

sebesar 0,376 atau setara 37,6%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal, kurangnya standar kompetensi dan kegiatan pelatihan dalam pengelolaan APBDes, dan kebijakan sumber daya manusia yang berbeda dalam setiap pemerintah desa sehingga menyebabkan adanya variasi dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal. Adapun sisanya sebesar 62,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan budaya organisasi.

6. ACKNOWLEDGEMENTS

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada Universitas Sebelas April atas dukungan dan bimbingan yang diberikan selama proses penelitian. Peneliti juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah Desa di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang telah bersedia menjadi bagian dari penelitian ini dan memberikan data yang diperlukan. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan jurnal penelitian ini.

REFERENCES

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Haning, M. T., Hasniati, & Tahili, M. H. (2020). *Public Trust Dalam Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Makasar:UPT Unhas Press.
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan”. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*. Vol. 4, (1), 17-27.
- Hery. (2019). *Auditing Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta:PT Grasindo.
- Husain, S. P., Seber, I. S., & Monoarfa, V. (2023). “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. *Jambura Accounting Review*. Vol. 4, (1), 66–76.
- Jabar.idntimes.com. (2019). *Terlibat Korupsi Dana Desa, Dua Mantan Kades Segera Disidang*. [Online]. Tersedia: <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/amp/hasanudin659/terlibat-korupsi-dana-desa-dua-mantan-kades-segera-disidang?page=all#page-2>
- Jayanti, A. T., & Setiyani, R. (2022). “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kudus”. *Business and Accounting Education Journal*. Vol. 3, (2), 241-252.
- Kementerian Desa, P. D. T. dan T. (2023). *Dana Desa*. [Online]. Tersedia: <https://sid.kemendes.go.id/village-fund>
- Nislandi, N. A., & Munari, M. M. (2023). “PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, TRANSPARANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI SIDOARJO”. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*. Vol. 12, (2), 143-150.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. [Online]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Pikiran-rakyat.com. (2017). *Mantan Kades di Majalengka Dijebloskan ke Rutan Kebonwaru*. [Online]. Tersedia: <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01289540/mantan-kades-di-majalengka-dijebloskan-ke-rutan-kebonwaru-414212>
- PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). [Online]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876>
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Sari, R. P., Hastuti, S., & Ratnasari, D. (2020). *Pemeriksaan Akuntansi Berbasis International Standards On Auditing*. Surabaya:Scopindo Media Pusaka.
- Sholikhah, A. L., Sasana, H., & Priyono, N. (2022). “Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kabupaten Jepara)”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol 11, (1), 9-20.
- Sugiyono. (2021). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung:CV ALFABETA
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. [Online]. Tersedia:https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf